

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

8.1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan perencanaan. Berikut ini ditampilkan indikator kinerja utama Kabupaten Pemalang:

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pemalang

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Angka kriminalitas	Jumlah kasus kejahatan dibagi jumlah penduduk kali 100 ribu	angka	200	200	190	190	185	185	180	180
2.	Indeks Risiko Bencana	Perhitungan dari <i>hazard</i> (bahaya) dikali <i>vulnerability</i> (kerentanan) dibagi <i>capacity</i> (kapasitas)	Indeks	165,97	160	154	148	142	136	130	130
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks komposit proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa	Indeks	61,09	62,72	64,97	66,58	67,66	68,09	70,00	70,00
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indikator yang mencerminkan kualitas hidup penduduk, meliputi: Usia Harapan Hidup (UHH), Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil Per Kapita	Indeks	66,32	66,62	67,39	68,17	68,95	69,75	70,00	70,00
5.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia, seperti IPM namun terpolah antara laki-laki dan perempuan (kesejangan pembangunan manusia antar laki-laki dan perempuan)	Indeks	85,83	85,93	86,03	86,13	86,23	86,33	88,00	88,00

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.	Indeks Kebudayaan	Indeks yang menunjukkan ketahanan sosial budaya, pelestarian warisan budaya, ekspresi budaya, dan ekonomi budaya	Indeks	NA	42,8	45,78	48,9	52,86	57,00	59,06	59,06	
7.	Indeks kerukunan umat beragama	Perhitungan dari tiga indikator besar: toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama	Indeks	NA	67,00	67,97	68,94	69,91	70,88	71,87	71,87	
8.	Angka kemiskinan	Perhitungan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan. Jumlah penduduk miskin (di bawah garis kemiskinan) dibagi jumlah seluruh penduduk dikali 100%.	%	16,02	15,81	15,60	15,39	15,18	14,97	14,30	14,30	
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	%	7,64	7,50	7,35	7,20	7,05	6,89	6,75	6,75	
10.	Indeks Desa Membangun	Indeks komposit tingkat kemandirian desa yang terdiri dari: Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan	Indeks	0,7167	0,7289	0,7478	0,7672	0,7878	0,8089	0,8289	0,8289	
11.	Indeks ketimpangan antar wilayah	Perbandingan ketersediaan sarana dan prasarana dalam wilayah kecamatan (jalan, perhubungan, air minum, perkotaan, persampahan, pariwisata, perdagangan, kesehatan, pendidikan) dibanding jumlah penduduk.	Indeks	0,38024	0,38024	0,38000	0,37800	0,37600	0,37400	0,36800	0,36800	
12.	Pertumbuhan ekonomi	Tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu sesuai perhitungan BPS	%	-0,66	2,15	3,64	3,71	3,80	4,00	4,50	4,50	
13.	Laju Inflasi	Pengukuran peningkatan harga-harga secara umum berkaitan dengan mekanisme pasar sesuai perhitungan BPS	%	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	
14.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur: jalan, irigasi, air minum, drainase, persampahan, RTH, LPJU, rumah susun, APILL, perparkiran, terminal, hotspot.	Indeks	71,03	71,08	71,13	71,18	71,23	71,28	71,33	71,33	
15.	IKLHD	Penghitungan komposit dari skor kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan.	Indeks	68,58	68,92	69,07	69,37	69,52	69,67	69,82	69,82	

8.2. Indikator Tujuan dan Sasaran Peringkat Daerah

Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung/mewujudkan Sasaran dan Tujuan Daerah sesuai tupoksi masing-masing, yang dijabarkan pada tabel dibawah ini

Tabel 8.2. Tujuan & Sasaran PD

Tujuan Dan Sasaran PD Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

Visi: “Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”.

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian				Kondisi Akhir	Ususan/ Unsur/ PD	
										2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Misi 1 : Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat																		
1. Meningkatkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	1. Angka kriminalitas	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban wilayah	1) Jumlah konflik sosial					Jumlah kasus kejahatan dibagi jumlah penduduk kali 100 ribu	angka	200	200	190	190	185	185	180	180	Kesbang pol,
								Perbedaan cara pandang terhadap permasalahan yang meluas dan mengakibatkan konflik di masyarakat skala kabupaten	kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD	
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
a	b	c	d	1 Meningkatkan kondusivitas wilayah	2 Jumlah konflik sosial	3	4	5 Perbedaan cara pandang terhadap permasalahan yang meluas dan mengakibatkan konflik di masyarakat skala kabupaten	6 kasus	7	8	9	10	11	12	13	14	15 Bakes- bangpol	
						Meningkat- nya kondusivitas wilayah	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	Potensi konflik sosial adalah pertikaian antar warga dan unjuk rasa yang disebabkan perbedaan cara pandang terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bakes- bangpol
			2) Persentase adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum					Jumlah kasus pelanggaran Perda/ Perbup dibagi jumlah jenis pelanggaran yang diatur dalam Perda/Perbup dikali 100%	%	100	100	98	96	94	92	90	90	90	Trantibu minmas
				Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah	Persentase adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum			Jumlah kasus pelanggaran Perda/ Perbup dibagi jumlah jenis pelanggaran yang diatur dalam Perda/ Perbup dikali 100%	%	100	100	98	96	94	92	90	90	90	Satpol PP
						Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentraman	Persentase kawasan patuh ketentraman	Jumlah kecamatan yang menurun pelanggaran perda/perbupnya	%	0	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	14,29	14,29	Satpol PP



Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD		
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	1. Indeks Risiko Bencana					dan keterlibatan umum	dan keterlibatan umum	dibagi jumlah seluruh kecamatan dikali 100%	Indeks	165,97	160	154	148	142	136	130	130			
	1. Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya kualitas penanganan bencana	1. Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah			Komponen kelembagaan, peningkatan dini, pendidikan, mitigasi, & kesiapsiagaan bencana	Indeks	0,55	0,63	0,7	0,75	0,8	0,82	0,85	0,85	0,85	Tranribum-linmas	
								Komponen kelembagaan, peningkatan dini, pendidikan, mitigasi, & kesiapsiagaan bencana	Indeks	0,55	0,63	0,7	0,75	0,8	0,82	0,85	0,85	0,85	BPBD	
						Meningkatnya layanan informasi rawan bencana	Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana/ Jumlah Warga Negara di daerah rawan bencana	%	94	100	100	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
						Meningkatnya layanan informasi rawan bencana	Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi Jumlah Warga	%	94	100	100	100	100	100	100	100	100	100	BPBD



Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Unsur/ Unsur/ PD	
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						an terhadap bencana	dan kesiapsiagaan	Negara di daerah rawan bencana	%	99	100	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
						Meningkatnya layanan evakuasi dan tanggap darurat	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan evakuasi dan tanggap darurat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan evakuasi dan tanggap darurat dibagi Jumlah warga negara yang harus dievakuasi dan mendapat penangan tanggap darurat	%	15	15	20	20	25	25	25	25	25	BPBD
						Meningkatnya layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam	Persentase layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam	Jumlah sarana dan prasarana yang mendapat layanan rehabilitasi dan rekonstruksi dibagi Jumlah sarana dan prasarana terdampak bencana	%	90	88	86	84	82	80	78	78	78	Tranibumlinmas
								Jumlah kejadian kebakaran di wilayah WMK dibagi jumlah wilayah WMK dikali 100%	%	90	88	86	84	82	80	78	78	78	Satpol PP
								Jumlah kejadian kebakaran di wilayah WMK dibagi jumlah wilayah WMK dikali 100%	%	90	88	86	84	82	80	78	78	78	Satpol PP



Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal					Kondisi Akhir	Unsur/Unsur/ PD		
										2020	2021	2022	2023	2024			2025	2026
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Meningkatnya pencegahan dan penanganan kebakaran sesuai response time	Cakupan pelayanan kebakaran	Jumlah luas WMK dibagi luas wilayah kabupaten dikali 100%	%	20	25	30	35	40	45	50	50	Satpol PP
Misi 2: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih																		
1	Indeks Reformasi Birokrasi							Indeks komposit proses menata ulang birokrasi dan tingkat terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realists, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa	Indeks	60,2	62,72	64,97	66,58	67,66	68,09	70	70	
	1. Meningkatkan anyanya birokrasi akuntabel	1) Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)						Evaluasi oleh Kemen PAN-RB berdasarkan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, pedoman akuntabilitas kinerja yang telah disusun, pemutakhiran	Nilai	67,7	69,05	70,36	71,15	71,85	72,35	73,35	73,35	Setda, Perencanaan,



Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah	% peningkatan kinerja penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dibawah bidang Pemerintahan dan kesejahteraan perekonomian			data kinerja yang dilakukan secara berkala	Nilai	NA	NA	71,9	73,0	73,7	74,9	75,4	75,4	Setda
				meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan daerah pemerintahan dan kesra	meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan daerah pemerintahan dan kesra			Evaluasi oleh Kemen PAN-RB berdasarkan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, pedoman akuntabilitas kinerja yang telah disusun, pemutakhiran data kinerja yang dilakukan secara berkala	%	Na	Na	91,93	92,27	93,13	93,87	94,40	94,40	Setda
				meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan daerah pemerintahan dan kesra	meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan daerah pemerintahan dan kesra			Rata2 capaian kinerja pada penyelenggaraan urusan dibidang pemerintahan dan kesra (tata pemerintahan, hukum dan kesra)	%	Na	Na	65,81	68,40	69,13	71,52	72,13	72,13	
				meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan daerah pemerintahan dan kesra	meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan daerah pemerintahan dan kesra			Rata2 capaian kinerja pada penyelenggaraan urusan dibidang perekonomian dan pembangunan (pembangunan, perekonomian dan	%	Na	Na	65,81	68,40	69,13	71,52	72,13	72,13	

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD		
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
						dan pembangunan	dan pembangunan	SDA, pengadaan barang jasa)												
						Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi umum	% pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang administrasi umum	Rata-rata? capaian kinerja pada penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian dan pembangunan (organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, umum)	%	Na	Na	57,87	8,37	58,77	59,18	59,59	59,59			
				Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) komponen Perencanaan			Evaluasi oleh Kemen PAN-RB berdasarkan: upaya peningkatan kapasitas SDM yang menanganai kuantabilitas kinerja, pedoman akuntabilitas kinerja yang telah disusun, pemutakhiran data kinerja yang dilakukan secara berkala komponen perencanaan	Indeks	22,22	22,24	22,26	22,28	22,30	22,32	22,34	22,34			Bappeda
/						Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Peringkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan Daerah yang Peringkat Daerah yang baik	Jumlah dokumen perencanaan Daerah yang baik (nilai komponen perencanaan lebih dan 21) dibagi jumlah dokumen perencanaan Peringkat Daerah dikali 100%	%	12,19	19,51	26,83	34,15	41,46	48,78	56,09	56,09			Bappeda
			2) Indeks Kapasitas					Kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui	Indeks	1,330	1,330	1,332	1,334	1,336	1,338	1,340	1,340			Keuangan

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD	
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Fiskal Daerah	Meningkatkan Kualitas Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah	Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)			pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya telah ditentukan dan belanja tertentu, berdasarkan perhitungan Kementerian		Nilai	80	80	80	80	80	80	80	BPKAD	
					Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		1. Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran (Bobot Nilai 15)	Jumlah Nomenklatur program dan Anggaran Program di APBD dan KUA PPAS yang sesuai dibanding Jumlah Program.	Bobot Nilai	15	15	15	15	15	15	15	15	BPKAD	
							2. Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran (BN 20)	Jumlah Skor penyerapan anggaran belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bansos, belanja bagi hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Barang/Jasa, Belanja	Bobot Nilai	20	20	20	20	20	20	20	20	20	BPKAD

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Tidak Terduga dan Belanja Modal dibagi Jumlah Jenis Belanja										
							3 Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah (BN 15)	Jumlah hasil penghitungan Kemandirian Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Operasional, Solvabilitas Jangka Pendek dan Solvabilitas Jangka Panjang dibagi Jumlah Jenis Komponen Kondisi Keuangan Daerah.	Bobot Nilai	20	20	20	20	20	20	20	20	BPKAD
					Persentase Pemantauan BMD (93%)			Jumlah BMD yang telah dimanfaatkan dibanding jumlah potensi BMD yang dimanfaatkan	%	93	93	93	93	93	93	93	93	BPKAD
						Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki (50%)	Jumlah BMD yang dimiliki dibanding dengan Jumlah BMD yang dikuasai	%	50	50	55	60	65	70	75	75	BPKAD
				Meningkatkan tata kelola pendapatan daerah yang efektif.	Rasio peningkatan PAD			Perbandingan Realisasi PAD tahun n dikurangi realisasi PAD tahun n-1 dibagi	%	12,72	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	Bapenda



Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD		
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
a	b	c	d	1 transparan dan akuntabel	2	3	4	5 jumlah total PAD tahunan dikali 100%	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
						Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD	Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah	Perbandingan jumlah total PAD dibagi Jumlah total Pendapatan Daerah kali 100%	%	6,0	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	Bapenda	
			3) Manajemen Risiko Indeks					Evaluasi oleh BPKP meliputi : (1) Kapabilitas terdiri dan kepemimpinan, strategi dan kebijakan manajemen risiko, sumber daya manusia dan mitraan; (2) Hasil terdiri dari aktivitas penanganan risiko dan outcomes	Angka	1,53	1,83	2,15	2,45	3,00	3,05	3,10	3,10	3,10	Pengawasan	
				Terselenggara nya pengawasan internal yang menjamin mutu atas kinerja Pemda dalam mewujudkan birokrasi yang transparan dan akuntabel	Maturitas SPJP			Hasil QA dari BPKP	Angka	3,0375	3,0380	3,0385	3,0390	3,0395	3,0400	3,0405	3,0405	3,0405	3,0405	Inspektoral
						Meningkatnya peran APJP dalam	Kapabilitas APJP	Evaluasi oleh BPKP terhadap kualitas dan Sistem Pengendalian Intern Organisasi	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Inspektoral

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			4) Indeks Kearsipan			pengawasan internal		Penilaian oleh ANRI, meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal	Indeks	42,00	55,12	56,32	57,12	57,92	58,32	59,12	59,12	Kearsipan
				Meningkatkan birokrasi akuntabel	Indeks Kearsipan			Penilaian oleh ANRI, meliputi pengawasan kearsipan eksternal dan pengawasan kearsipan internal	Indeks	42,00	55,12	56,32	57,12	57,92	58,32	59,12	59,12	Dinpusar dan
						Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mampu mengelola arsip dengan baik	Jumlah Perangkat Daerah yang mampu mengelola arsip dengan baik dtbagi jumlah Perangkat daerah di kali 100%	%	9,75	10,00	22,50	40,00	60,00	80,00	100	100	Dinpusar dan
		2. Meningkatkan Birokrasi Kapabel	1) Indeks Profesi alitas ASN (IPA)					Indeks profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, berdasarkan pengukuran Kemen PAN-RB	Indeks	64,35	64,48	64,61	64,85	65,10	65,34	65,59	65,59	Kepegawaian

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal					Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022		
a	b	c	d	1 Meningkatnya birokrasi kapabel	2 Indeks Profesional ASN (IPA)	3	4	5 Indeks profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, berdasarkan pengukuran Kemen PAN-RB	6 Indeks	7 64,35	8 64,48	9 64,61	10 64,85	11 65,10	12 65,34	13 65,59	14 65,59	15 BKD			
						Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	Pengukuran IP ASN berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 dan Permenpan Nomor 38 Tahun 2018	Indeks	64,35	64,48	64,61	64,85	65,10	65,34	65,59	65,59	BKD			
						Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase Kompetensi ASN	Persentase Peningkatan kompetensi ASN	%	57,20	57,20	57,20	57,50	57,80	58,10	58,40	58,40	BKD			
						Meningkatnya Kinerja ASN	Persentase Kinerja ASN	Persentase Peningkatan Kinerja ASN	%	80,30	80,30	80,30	80,30	80,30	80,30	80,30	80,30	BKD			
						Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN	Persentase Tingkat Pendidikan ASN	Persentase PNS yang meningkatkan tingkat pendidikan	%	59,60	50,10	50,60	51,10	51,60	52,10	52,60	52,60	BKD			
						Meningkatnya Disiplin ASN	Persentase Tingkat Disiplin ASN	Persentase Penurunan	%	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	BKD			



Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal						Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD		
										2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								pelanggaran disiplin ASN											
			2) Indeks SPBE					Indeks komposit SPBE berdasarkan: Kepemilikan Arsitektur SPBE, Kepemilikan Peta Rencana SPBE, pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE, penerapan Manajemen Layanan SPBE, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik, Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik.	Indeks	3,34	3,34	3,36	3,38	3,42	3,46	3,50	3,50	Kominfo, Statistik, Persandi an	
				Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Pemalang	Indeks SPBE				Indeks	3,34	3,34	3,35	3,36	3,37	3,38	3,4	3,4	Kominfo	
						Meningkatnya Pengembangan pemanfaatan TIK	Persentase Network Terintegrasi	Jumlah network perangkat daerah dan layanan publik yang terintegrasi dibandingkan dengan jumlah seluruh perangkat daerah dan layanan publik	persen	70,73	74	78	82	88	90	90	90	90	Kominfo (Aplikasi Informatika)
						Meningkatnya keamanan informasi	Tingkat/ Indeks Kematangan Keamanan	Tingkat Keamanan Informasi	Indeks	2	2,2	2,3	2,4	2,5	3	3	3	3	Kominfo (Persandi an)

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD	
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				Peningkatan kualitas layanan informasi publik	Indeks/nilai Keterbukaan Informasi Publik	untuk mendukung SPBE	Informasi (KAMI).	Pemerintah dilihat dari Indeks KAMI.											
								Indeks/nilai yang diberikan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi		74,83	76	78	79	80	82	82	82	82	Kominfo (Pengelolaan Informasi Publik)
						Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	Jumlah data statistik sektoral yang berkualitas sesuai standar dibandingkan dengan jumlah seluruh data statistik sektoral	persen	0,5	1	2	4	5	8	8	8	8	Kominfo (Statistik)
						Meningkatnya kualitas Layanan Informasi dan komunikasi Publik	Persentase Penduduk yang terpapar informasi publik	Jumlah penduduk yang terpapar informasi publik dibandingkan dengan jumlah penduduk	Persen	17,2	25	35	45	55	65	65	65	65	Kominfo (Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik)
		3. Meningkatkan pelayanan publik	Rata rata indeks kepuasan masyarakat					Rerata capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik pada PD	Indeks	81,75	81,95	82,15	82,40	82,60	82,80	83,00	83,00	Dukcapil, Setwan, Litbang, Kewilayahan	

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		yang prima		Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Cakupan layanan administrasi kependudukan	Capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil	Indeks	77,02	78	79	80	81	82	83	83	Disdukca tpil
				Meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD yang prima	Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan			Rerata dari persentase kepemilikan dokumen kependudukan, persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama dan persentase data kependudukan yang mutakhir	%	67,80	72,55	77,10	81,65	86,20	90,75	94,66	94,66	Disdukca tpil
								Capaian kepuasan DPRD atas penyelenggaraan layanan Sekretariat DPRD	Indeks	81,25	82,25	85,25	87,25	90,25	92,25	92,25	92,25	Sekretari at DPRD

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				sekretnat DPRD		Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretnat DPRD	Cakupan layanan Sekretnat DPRD	Rerata dari persentase dukungan pelaksanaan tugas fungsi pokok DPRD yang tersedia, persentase dukungan pelaksanaan tugas fungsi lain DPRD yang tersedia dan persentase layanan kepada DPRD yang tersedia	%	75,01	76,72	77,81	79,38	80,97	82,33	83,82	83,82	Sekretnat DPRD
					Indeks kepuasan layanan kelibangan			Capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan kelibangan pada Bappeda	Indeks	85	86	87	88	89	90	91	91	Bappeda (Litbang)
						Meningkatkan kualitas pelayanan kelibangan		Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dibagi jumlah hasil penelitian dan pengembangan dikali 100%	%	80	81	82	83	84	85	86	86	Bappeda (Litbang)
				Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap			Capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan	Indeks	78	78	80	82	84	85	86	86	Kecamatan Bantarbolang

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian				Kondisi Akhir	Unsur/ Unsur/ PD	
										2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026
a	b	c	d	1	2 layanan kecamatan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	Rerata dan persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif persentase gangguan ketertarikan dan ketertarikan umum tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	94,09	94,29	94,49	94,69	96,07	96,27	96,47	96,47	Kecamatan Bantarbolang
				Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	Capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan	Indeks	85,36	85,4	85,5	85,5	85,6	85,6	85,6	85,6	Kecamatan Petarukan
						Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	Rerata dan persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan ketertarikan dan ketertarikan umum tingkat desa dan kecamatan yang	%	94,22	94,22	94,89	94,89	95,56	95,56	96,22	96,22	Kecamatan Petarukan

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD		
										2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								tertangani, persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik											
				Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	Capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan	Indeks		82,42	83	84	85	86	87	88	88	Kecamatan Moga
								Rerata dari persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan ketertarikan dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, serta persentase	%	86,73	87,29	87,49	89,69	89,89	90,09	92,29	92,29	Kecamatan Moga	

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								desa bertata kelola pemerintahan baik										
				Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan			Capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan	Indeks	83,36	83,40	83,45	83,50	83,55	83,60	83,65	83,65	Kecamatan Pemalang
						Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	Rerata dari persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan Kelurahan yang aktif, persentase gangguan ketertarikan dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	86,99	86,99	88,53	88,53	90,07	90,07	91,61	91,61	Kecamatan Pemalang
				Meningkatkan pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat			Capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan	Indeks	87	78	79	79	80	80	80	80	Kecamatan

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1 kecamatan yang prima	2 terhadap layanan kecamatan	3	4	5 pelayanan pada Kecamatan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 Randudo ngkal
						Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	Rerata dan persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan ketertarikan dan keterlibatan umum tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	95,87	96,44	96,44	96,44	97,55	97,55	97,55	97,55	Kecamatan Randudo ngkal
				Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan			Capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan	Indeks	80	82	84	86	88	90	92	92	Kecamatan Watukumpul

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	Rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	93,33	93,33	94,67	94,67	96,00	96,00	97,33	97,33	97,33	97,33	97,33	97,33	Kecamatan Watukumpul
		Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima		Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan			Capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan	Indeks	78	78	80	82	84	85	86	86	Kecamatan Ampelgading
		Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	Rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase	%	91,18	92,18	93,44	93,33	94,68	94,68	94,68	94,68	94,68	94,68	94,68	94,68	Kecamatan Ampelgading

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	Indeks	78,00	83,31	84,31	85,31	86,31	87,31	88,31	88,31	Kecamatan Belik
								Rerata dari persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan ketentraman dan	%	93,67	93,67	95,33	95,33	97,00	97,00	98,67	98,67	Kecamatan Belik

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD	
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik											
				Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan			Capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan	Indeks	78	78	79	79	80	80	80	80		Kecamatan Pulosari
						Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	Rerata dari persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan ketertiban umum dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, persentase potensi	%	93,89	93,89	93,89	93,89	93,89	93,89	93,89	93,89		Kecamatan Pulosari



Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian				Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD	
										2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik										
				Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan			Capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan	Indeks	77,42	77,85	78,10	78,25	78,85	79	79,25	79,25	Kecamatan Bodeh
						Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	Rerata dari persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan ketentraman dan keteriban umum tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, serta persentase	%	87,03	88,88	90,14	91,39	91,59	93,89	94,09	94,09	Kecamatan Bodeh



Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								desa bertata kelola pemerintahan baik										
				Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	Capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan	Indeks	78	80,70	83	85	90	92	95	95	Kecamatan Comal
								Rerata dari persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan ketertarikan dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	85,48	87,11	88,22	89,33	90,44	91,55	92,67	92,67	Kecamatan Comal



Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1 Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	2 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	3	4	5 Capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan	6 Indeks	7 86,06	8 86,12	9 86,18	10 86,23	11 86,26	12 86,33	13 86,35	14 86,35	15 Kecamatan Ulujuami
						Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	Rerata dari persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan ketentrangan dan keterlibatan umum tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	87,83	87,93	89,25	89,45	90,76	90,96	92,07	92,07	Kecamatan Ulujuami
				Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap			Capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan	Indeks	80	82	84	86	88	90	92	92	Kecamatan Wanungring

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD		
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
a	b	c	d	1	2 layanan kecamatan	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	Rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan ketertarikan dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%		88,22	88,22	88,22	88,22	91,55	91,55	91,55	91,55	91,55	Kecamatan Warungring
				Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan			Capaian kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan	Indeks		75,5	77,5	79,5	81,5	83,5	85,5	87,5			Kecamatan Taman

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	Rerata dari persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif, persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	75,22	76,47	77,72	78,98	80,23	80,43	82,73	82,73	Kecamatan Taman
Misi 3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong																		
1 Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	1. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)							Indikator yang mencerminkan kualitas hidup penduduk meliputi: Usia Harapan Hidup (UHH), Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil Per Kapita	Indeks	66,32	66,32	66,35	66,40	66,50	66,60	66,80	67,00	

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Ususi/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing	1) Rata-rata lama sekolah						Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	Tahun	6,42	6,50	6,70	6,90	7,10	7,30	7,50	7,50	Pendidikan
		2) Harapan lama sekolah		Meningkatnya kualitas pendidikan yang berdaya saing	Rata-rata lama sekolah			Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan diakses oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	Tahun	11,95	12,00	12,10	12,20	12,30	12,40	12,50	12,50	Pendidikan
								Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	Tahun	6,42	6,50	6,70	6,90	7,10	7,30	7,50	7,50	Dindikbud
					Harapan lama sekolah			Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan diakses oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	Tahun	11,95	12,00	12,10	12,20	12,30	12,40	12,50	12,50	Dindikbud
							Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini	%	24,5	24,5	100	100	100	100	100	100	Dindikbud
							Tingkat partisipasi warga negara	Pendidikan pada sekolah dasar	%	109,2	109,2	100	100	100	100	100	100	Dindikbud

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar											
							Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Pendidikan pada sekolah menengah pertama	%	101,1	101,1	100	100	100	100	100	100	Dindikbud
							Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar/ menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang terlayani pada paket A, B dan C dibagi jumlah penduduk usia 7-18 tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Dindikbud
							Sekolah berakreditasi minimal B	Nilai akreditasi sekolah (akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian assessment sekolah secara sistematis dan	nilai	B	B	B	B	B	B	B	B	Dindikbud

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Ususan/ Unsur/ PD	
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								komprehensif melalui kegiatan evaluasi internal dan evaluasi eksternal (visitas) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah)											
		2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup					Rata-rata banyaknya tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal	Tahun	73,4	73,5	73,6	73,7	73,8	73,9	74,0	74,0	74,0	Kesehatan, Daiduk KB, Pangan, Kepemudaan dan Olahraga
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup			Rata-rata banyaknya tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal	Tahun	73,4	73,5	73,6	73,7	73,8	73,9	74,0	74,0	74,0	Dinkes
								Angka kematian ibu pada saat hamil, bersalin, nifas per 100.000 kelahiran hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.	%	58,85	58,5	58	58	57	56	55	55	55	Dinkes
								Angka Kematian Bayi	%	5,14	5	5	4,9	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8	Dinkes



Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								kurun waktu tertentu.										
							Persentase Balita Stunting	Persentase balita dengan status gizi sangat pendek dan pendek berdasarkan indeks panjang badan menurut umur (TBU) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.	%	14	14	12	10	9,50	9,50	9	9	Dinkes
							Indeks Keluarga Sehat	Indikator keluarga sehat dari seluruh keluarga di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu, yang besarnya berkisar antara 0-1	Indeks	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	Dinkes
				Menurunkan angka kelahiran	TFR			Rata-rata anak yang dilahir seorang perempuan pada masa suburnya	angka	2,51	2,50	20,49	2,48	2,47	2,46	2,45	2,45	Dinsos PPPA (Daiduk KB)
						Menurunkan angka kelahiran pada kelompok	ASFR (15-49 tahun	Banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu (15-49 tahun)	Angka	35	35,00	35,00	35,00	34,00	34,00	33,00	33,00	Dinsos PPPA (Daiduk KB)

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Unsur/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		usia tertentu																
								Jumlah peserta KB aktif modern dibagi jumlah pasangan usia subur kali 100%	%	22,48	22,50	23,00	23,30	23,50	24,00	24,30	24,30	
								Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive prevalence (mCP)										
								Jumlah PLUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100%	%	10,12	10,10	10,09	10,08	10,07	10,06	10,05	10,05	
								Jumlah Pasangan Usia Subur										
								Jumlah PLUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100%	%	62,5	25	25	25	25	25	25	25	
								Jumlah cadangan pangan dibagi kebutuhan pangan x 100%	%									
								Jumlah cadangan pangan dibagi kebutuhan pangan x 100%	%	16,21	18,46	20,72	22,97	25,22	27,47	29,72	29,72	
								Infrastruktur lumbung pangan yang tersedia dibagi jumlah desa yang ada x 100%	%									
								Infrastruktur lumbung pangan yang tersedia dibagi jumlah desa yang ada x 100%	%									
								Perentase infrastruktur pergunakan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan										
								Perentase infrastruktur pergunakan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan										
								Meningkatkan Sumber daya ekonomi dan kemandirian pangan										
								Meningkatkan gizi masyarakat										
								Meningkatkan gizi masyarakat										
								Persentase persediaan pangan										
								Persentase persediaan pangan										

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Unsur/Unsur/ PD	
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor PPH	Susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbu energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan	Angka	92,6	93,1	93,6	94,1	94,7	95,2	95,2	95,2	95,2	Dispersi (Pangan)
						Meningkatkan keamanan pangan dan kerawanan pangan	% tertanganinya kejadian kerawanan pangan	Tertanganinya kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah/masyarakat/ rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat	%	40,00	34,28	31,42	28,57	25,71	22,82	20,00	20,00	20,00	
				Meningkatkan kualitas kesehatan, kebugaran dan prestasi pada bidang olahraga	% peningkatan prestasi olahraga			Jumlah prestasi olahraga tahun n – jumlah olahraga tahun n-1 dibagi jumlah prestasi olahraga tahun n-1	%	47,83	NA	42,85	50	33,33	25	20	20	20	Dinparpora (Pora)

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal					Target Capaian					Kondisi Akhir	Unsur/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024		
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Dinparpora (Pora)		
				Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah perolehan medali pada event olahraga regional	Jumlah medali yang diperoleh pada event olahraga regional	Jumlah medali yang diperoleh pada event olahraga regional	Medali	0	7	8	10	15	20	25	30	30			
				Meningkatkan karakter dan kualitas pemuda yang berdaya saing	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Meningkatkan jumlah pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota dibagi jumlah pemuda 16-30 tahun di kabupaten kota	%	0	0,02	0,04	0,07	0,08	0,09	0,11	0,11	0,11			
									%	28,08	29,04	30,01	30,98	31,95	32,92	33,38	33,38	33,38			
									%	0	38,89	53,57	83,33	85,71	88,10	93,33	93,33	93,33			
									Indeks	85,83	85,93	86,03	86,13	86,23	86,33	86,43	86,43	86,43	Pemberdayaan Perempuan		

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD	
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		an dan keadilan gender dalam pembangunan	n Gender (IPG)					manusia, seperti IPM namun terpecah antara laki-laki dan perempuan (kesejahteraan pembangunan manusia antar laki-laki dan perempuan)										an dan Perlindungan Anak	
				Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pembedaan Gender (IDG)			Angka yang menunjukkan seberapa peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	Indeks	80,95	81,50	82,05	82,60	83,15	83,70	84,25	84,25	Dinsos PPPA (PPPA)	
						Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Indeks PUG/Pengaruh APE		madya			Utama	Utama	Utama	Utama	Utama	Utama		Dnsos PPPA (PPPA)
						Meningkatnya perlindungan pemenuhan hak anak	Indeks PAV/Pengaruh KLA		madya			nindya	nindya	nindya	nindya	nindya	nindya		Dnsos PPPA (PPPA)
2 Meningkatkan nilai-nilai budaya, toleransi dan karakter bangsa	2. Indeks Kebudayaan							Nilai komposit dari dimensi ekonomi budaya, pendidikan, warisan budaya dan nilai budaya literasi	Indeks	NA	42,80	45,78	49,90	52,86	57,00	59,06	59,06		

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD	
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1. Meningkatkan pelestarian budaya	Persentase warisan budaya yang ditetapkan					Jumlah warisan budaya yang ditetapkan dibagi jumlah warisan budaya yang lolos verifikasi dikali 100%	%	3,57	5,39	6,56	7,89	8,47	9,8	9,8	9,8	Kebudayaan	
				Meningkatkan pelestarian budaya	Persentase warisan budaya yang ditetapkan (%)			Jumlah warisan budaya yang ditetapkan dibagi jumlah warisan budaya yang lolos verifikasi dikali 100%	%	3,57	5,39	6,56	7,89	8,47	9,8	9,8	9,8	Dindikbud	
						Meningkatkan pelestarian budaya	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah warisan budaya yang dipelihara dibagi jumlah warisan budaya yang diregistrasi dikali 100%	%	54,35	56,51	59,27	60,80	62,81	63,83	65,09	65,09	65,09	Dindikbud
		2. Meningkatkan kualitas budaya literasi di masyarakat	Nilai budaya literasi					Rerata dari persentase penduduk yang baca cetak/elektronik, persentase penduduk yang akses internet dan persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/taman baca masyarakat	Indeks	1,24	23,46	24,12	24,80	25,66	26,45	27,23	27,23	27,23	Perpustakaan

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1 Meningkatkan kualitas budaya literasi di masyarakat	2 Nilai budaya literasi	3	4	5 Rerata dari persentase penduduk yang baca cetak/elektronik, persentase penduduk yang akses internet dan persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/aman baca masyarakat	6 Indeks	7 1,24	8 23,46	9 24,12	10 24,80	11 25,66	12 26,45	13 27,23	14 27,23	15 Dinpusar da
						Meningkatnya budaya literasi di masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Perhitungan aspek pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan ber-SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan, anggota perpustakaan	Indeks	7.033	7.150	7.300	7.600	7.900	8.200	8.500	8.500	Dinpusar da
	3. Indeks kerukunan umat beragama							Perhitungan dan biga indikator besar: toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama	Indeks	NA	67,00	67,97	68,94	69,91	70,88	71,87	71,87	
		Meningkatnya solidaritas agama	Jumlah konflik agama					Jumlah kejadian konflik agama skala kabupaten	kasus	0	0	0	0	0	0	0	0	Kesbang pol

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1 Meningkatkan solidaritas keagamaan	2 Jumlah konflik agama	3	4	5 Jumlah kejadian konflik agama skala kabupaten	6 kasus	7	8	9	10	11	12	13	14	15 Bakesbangpol
						Meningkatkan solidaritas keagamaan	Persentase potensi konflik agama yang tertangani	Potensi konflik agama adalah pertikaian antar umat beragama yang disebabkan Perbedaan cara pandang terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bakesbangpol
3 Meningkatkan penangan kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial	Angka kemiskinan							Perhitungan ketidaktampanan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan. Jumlah penduduk miskin (di bawah garis kemiskinan) dibagi jumlah seluruh penduduk dikali 100%	%	16,02	15,81	15,60	15,39	15,18	14,97	14,30	14,30	Bakesbangpol
		Meningkatkan daya saing tenaga kerja dalam rangka penurunan pengangguran	1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)					Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	%	7,64	7,50	7,35	7,20	7,05	6,89	6,75	7,64	Ketenagakerjaan Transmigrasi

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1 mengurangi jumlah pengangguran	2 prosentase pengurangan yang ditangani	3 Meningkatkan kualitas dan kualitas tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran serta perlindungan tenaga kerja	4 Indeks ketenagakerjaan	5 persentase jumlah pengangguran yang ditangani dibanding jumlah pengangguran seluruhnya	6 %	7 NA	8 12,28	9 12,64	10 12,91	11 13,32	12 13,64	13 13,93	14 13,93	15 Disnaker (Ketenagakerjaan)
								Persentase pelatihan berbasis kompetensi + persentase tenaga kerja yang ditempatkan + persentase hubungan industrial	%	18,04	21,91	24,21	26,47	28,74	30,85	33,16	33,16	disnaker
				Meningkatkan kualitas dan kualitas tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran serta perlindungan tenaga kerja	% PMKS yang ditangani			Jumlah PMKS yang ditangani dibagi jumlah PMKS yang ada di Kabupaten kali 100%	%	10,21	12,76	15,32	17,87	20,42	22,97	25,53	25,53	Dinsos
				meningkatkan pemberdayaan, pemberian jaminan perlindungan sosial dan			Persentase penduduk tingkat kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat jaminan pendapatan, jaminan perlindungan sosial dibagi jumlah	%		32,84	41,06	49,27	57,48	65,7	73,91	82,12	82,12	Dinsos

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						rehabilitasi sosial pada penduduk yang terdaftar di DTKS	perindungan sosial dan rehabilitasi sosial	penduduk miskin desil 1 dan desil 2 kali 100%	%	17	17	34	57	68	85	100	100	Dinsos
							Persentase (%) penyandang disabilitas tertantar, anak tertantar, tertantar, lanjut usia tertantar dan gelandangan pengemis yang membutuhkan dasarnya di luar panti -----X 100 % Populasi penyandang disabilitas tertantar, lanjut usia tertantar dan gelandangan pengemis	Jumlah penyandang disabilitas tertantar, anak tertantar, lanjut usia tertantar dan gelandangan pengemis yang memenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti -----X 100 %	%	17	17	34	57	68	85	100	100	Dinsos
							Persentase korban bencana alam dan sosial yang memenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang memenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi Populasi korban bencana alam dan	%	46,00	85,00	100	100	100	100	100	100	Dinsos

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota	sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		14.446	14.500	14.600	14.700	14.800	14.900	15.000	15.000	Koperasi UKM, Sosial
			2) PDRB per kapita					Gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah	Ribu Rupiah	23,79	31	33	36	39	41	43	43	Diskopri ndag (Koperasi & UKM)
				Meningkatkan peran koperasi dan Usaha mikro dalam perekonomian daerah	Meningkatkan Koperasi yang berkualitas	meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi	Presentaseko perasi berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT volume usaha dan asset dibagi Jumlah seluruh koperasi kali 100 %	%	23,79	31	33	36	39	41	43	43	Diskopri ndag (Koperasi & UKM)
					Presentase usaha			Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT volume usaha dan asset dibagi Jumlah seluruh koperasi kali 100 %	%	-7,66	0,049	0,053	0,058	0,063	0,069	0,074	0,074	Diskopri ndag (Koperasi & UKM)
								UMKM yang naik kelas menjadi	%									Diskopri ndag

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Unsur/ Unsur/ PD	
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					mikro yang meningkat menjadi usaha kecil	meningkatkan usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persentase usaha mikro yang berijin	Jumlah usaha mikro yang berizin dibagi jumlah usaha mikro di kab kota	%		32,66	33,6	34,66	35,66	36,66	37,66	38,66		(Koperasi & UKM)
				Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	Persentase Perempuan yang diberdayakan di Bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi masyarakat			Jumlah perempuan yang diberdayakan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi masyarakat/ Jumlah seluruh perempuan pada organisasi masyarakat x 100	%	0,043	0,043	0,055	0,06	0,065	0,07	0,075	0,075		Dinsos PPPA (Sosial)
							Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dikuatkan / Jumlah seluruh lembaga penyedia layanan	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan / Jumlah seluruh lembaga penyedia layanan	%	40	40	47	52	57	62	67	67		Dinsos PPPA (Sosial)



Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD	
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							dikembangkan	pemberdayaan perempuan x 100											
Misi 4: Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan																			
1 Meningkatkan sinergitas pembangunan desa dan kota dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah	1. Indeks Desa Membangun							Indeks komposit tingkatan kemandirian desa yang terdiri dari: Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan	Indeks	0,7167	0,7289	0,7478	0,7672	0,7878	0,8089	0,8289	0,8289		
		Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	Meningkatkan keberdayaan desa	Persentase Desa Berdaya	Meningkatnya keberdayaan desa	Jumlah Desa Berdaya	Jumlah Desa Berdaya dibagi jumlah seluruh desa dikali 100%	%	4,2654	5,213	8,0657	10,900	14,692	18,483	21,327	21,327	Permasdes,	
									%	0	0,95	2,83	4,25	7,08	10,85	14,62	14,62	Dimpermasdes	
						Meningkatnya keberdayaan desa	Jumlah Desa Berdaya	Jumlah desa yang mampu mengelola potensi dan masalah guna meningkatkan PADes melalui penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan	Desa	0	2	6	9	15	23	31	31	Dimpermasdes	



Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Unsur/Unsur/ PD	
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								lembaga desa serta masyarakat desa sesuai kewenangan secara partisipatif maupun kerjasama desa											
	2. Indeks ketimpangan antar wilayah							Perbandingan ketersediaan sarana & prasarana dalam wilayah kecamatan (jalan, perhubungan, air minum, perkotaan, persampahan, pariwisata, perdagangan, kesehatan, pendidikan) dibanding jumlah penduduk.	Indeks	0,38024	0,38024	0,38000	0,37800	0,37600	0,37400	0,37200	0,37000		
								Jumlah kecamatan yang memiliki kelengkapan infrastruktur: jalan, permukiman perkotaan dengan PSU, kantor kecamatan, Taman dan Lapangan Olah raga dibagi jumlah seluruh kecamatan dikali 100%	%	14,29	14,29	14,29	14,29	21,43	28,57	35,71	35,71	PUPR,	
								Jumlah kecamatan yang memiliki kelengkapan infrastruktur: jalan, permukiman perkotaan dengan PSU, kantor	%	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	14,29	14,29	14,29	DPU-TR

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD	
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
					infrastruktur lengkap			kecamatan, Taman, dan Lapangan Olah raga dibagi jumlah seluruh Kecamatan dikali 100%											
						Terselenggaraanya bangunan gedung pemerintah an yang optimal dan sesuai regulasi	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan	Perbandingan antara total bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik dibagi total bangunan gedung pemerintahan	%	1,27	1,76	2,56	3,36	4,16	4,96	5,76	5,76	5,76	DPU-TR
Misi 5: Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal																			
1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor ekonomi unggulan dalam upaya kemandirian ekonomi daerah	1. Pertumbuhan ekonomi							Tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu sesuai perhitungan BPS	%	-0,66	2,15	3,64	3,71	3,80	4,00	4,50	4,50	4,50	
	2. Laju Inflasi							Pengukuran peningkatan harga-harga secara umum berkaitan dengan mekanisme pasar sesuai perhitungan BPS	%	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	



Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Unsur/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. Meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi berbasis potensi lokal	1) Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	Meningkatkan pertumbuhan usaha industri kecil menengah dalam perekonomian daerah	Prosentase pertumbuhan PDRB pada sektor Industri pengolahan dalam PDRB	Meningkatkan pertumbuhan industri kecil dan menengah		Selisih capaian sektor industri pengolahan dibanding tahun sebelumnya dibagi capaian tahun sebelumnya dikali 100%	%	-1,26	-0,50	0,50	1	1,1	1,2	1,5	1,5	Perindustrian
								Selisih capaian sektor industri pengolahan dibanding tahun sebelumnya dibagi capaian tahun sebelumnya dikali 100%	%	-1,26	-0,50	0,50	1	1,1	1,2	1,5	1,5	Diskopendag
								Jumlah IKM tahun n dikurangi JUmlah IKM tahun n-1 dibagi jumlah IKM tahun n-1 x 100%	%	0,25	2	5	6	6	6	6	6	
								Selisih capaian sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dibanding tahun sebelumnya dibagi capaian tahun sebelumnya dikali 100%	%	-3,49	-2,0	-1,0	0,5	1	1,3	1,4	1,4	Diskopendag

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD	
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	pertumbuhan volume perdagangan besar dan eceran dalam daerah	jumlah volume perdagangan tahunan dikurangi jumlah volume n-1 dibagi jumlah volume n-1 dikali 100 %	%	NA	0,8	1,2	2	2,6	3,4	4	4	Diskopendag	
						Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan	Prosentase pertumbuhan nilai ekspor	Nilai ekspor tahunan dikurangi nilai ekspor n-1 dibagi nilai ekspor n-1 dikali 100%	%	-34	25	25,5	26	26,5	27	27,5	27,5	2,75	Diskopendag
			2) Persentase pertumbuhan sektor Pertanian Kehutanan, dan Perikanan dalam PDRB					Selish capaian sektor Pertanian Kehutanan, dan Perikanan dibanding tahun sebelumnya dibagi capaian tahun sebelumnya dikali 100%	%	5,11	5,11	5,12	5,14	5,16	5,18	5,20	5,20	Pertanian, Kelautan dan Perikanan	
				Meningkatkan produktifitas dan produksi sektor pertanian	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB		Produktivitas pertanian (Padi)	Selish Capaian sektor pertanian dibanding tahun sebelumnya dibagi capaian tahun sebelumnya dibagi 100%	%	2,56	2,56	2,57	2,58	2,59	2,6	2,61	2,61	Disperant (pertanian)	
						Meningkatkan produktifitas sektor pertanian	Produktivitas sektor pertanian	Produksi padi dibagi luas panen	Kw/Ha	57,69	57,71	57,73	57,75	57,77	57,79	57,81	57,81	Disperant (pertanian)	

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Unsur/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Meningkatkan produksi dan nilai ekonomi berbasis potensi lokal	Produksi kopi	Meningkatnya produksi subsektor perkebunan	Produksi kopi	Jumlah produksi kopi dalam 1 tahun	kg	na	848	871	895	923	948	973,5		Disperian (pertanian)
					Prosentase produksi sektor perikanan dalam PDRB	Meningkatnya produksi subsektor peternakan	Produksi daging dan telur	Jumlah produksi daging sapi, daging ayam dan telur dalam 1 tahun	kg	16.921,23	15.390,367	15.503,050	15.661,756	15.731,496	15.847,280	15.964,119		Disperian (pertanian)
							produksi perikanan Tangkap	Selish Capaian Sektor perikanan dibanding tahun sebelumnya dibagi capaian tahun sebelumnya dikali 100	%	3,53	3,55	3,56	3,57	3,58	3,60	3,62		Disperik
						Meningkatnya produksi sektor perikanan	produksi perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan tangkap	kg	18.096,881	18.096,881	18.458,819	18.827,995	19.204,555	19.588,646	19.980,419		Disperik
							Produksi hasil olahan perikanan	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Kg	17.800,168	18.167,140	18.712,154	19.273,519	19.851,724	20.447,276	21.060,694		Disperik
			3) Persentase pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB				Produksi hasil olahan perikanan	Jumlah produksi hasil olahan perikanan	Kg	11.360,484	11.587,694	11.819,448	12.005,837	12.296,953	12.542,892	12.793,750		Disperik
								Selish capaian sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dibanding tahun sebelumnya dibagi capaian tahun sebelumnya dikali 100%	%	-3,49	-2,0	-1,0	0,5	1	1,3	1,4		Perdagangan



Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/Unsur/ PD	
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Meningkatnya produktivitas dan nilai ekonomi berbasis potensi lokal			Persentase pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	PDRB			Selisih capaian sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dibanding tahun sebelumnya dibagi capaian tahun sebelumnya dikali 100%	%	-3,49	-2,0	-1,0	0,5	1	1,3	1,4	1,4	Diskopendag	
						Meningkatnya jumlah industri dan perdagangan		Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki ijin sesuai ketentuan dibagi jumlah pelaku usaha diwilayah kabupatn/kota kali 100%	%	8,04	8,2	8,4	8,5	8,7	8,8	9	9	9	Diskopendag
								Jumlah retribusi sektor pariwisata ditambah pajak hotel, restoran dan hiburan dibagi jumlah PAD dikali 100%	%	0,94	0,95	1,10	1,25	1,55	1,65	1,75	1,75	1,75	Pariwisata
								Jumlah wisata tahun n dikurangi jumlah wisata tahun n-1	%	-28,84	10	10	10	10	10	10	10	10	Dinparpora

Kondisi Akhir	Urusan/Unsur/ PD
14	15
50	Dinparpora
10	
39,02	Dinparpora
0,73	

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD	
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						Meningkatkan sub sektor ekonomi kreatif potensial	Persentase perkembangan sub sektor ekonomi kreatif potensial	Jumlah sub sektor ekraf yang dikembangkan dibagi jumlah sub sektor ekraf yang potensial	%	50	50	58,33	66,67	75	87,5	100	100		
		2. Meningkatkan realisasi penanaman modal	Pertumbuhan nilai realisasi penanaman modal					Realisasi investasi dalam 1 tahun dikurangi realisasi investasi tahun sebelumnya dibagi realisasi investasi tahun sebelumnya dikali 100%	%	-90,5	1	2	3	4	5	6	6		Penanaman Modal
		3. Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN	Pertumbuhan nilai realisasi PMA dan PMDN					Realisasi investasi dalam 1 tahun dikurangi realisasi investasi tahun sebelumnya dibagi realisasi investasi tahun sebelumnya dikali 100%	%	-90,5	1	2	3	4	5	6	6		DPM-PTSP
						Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	Realisasi investasi dalam 1 tahun dikurangi realisasi investasi tahun sebelumnya dibagi realisasi investasi tahun sebelumnya dikali 100%	%	-90,5	1	2	3	4	5	6	6		DPM-PTSP

Misi 6: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan



Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Ususan/ Unsur/ PD	
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)							Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur: jalan, irigasi, air minum, drainase, persampahan, RTH/ taman kota, LPJU, rumah Susun, APILL, perparkiran, terminal, hotspot.	Indeks	71,03	71,08	71,13	71,18	71,23	71,28	71,33	71,33		
		1. Meningkatkan cakupan universal akses	Persentase capaian universal akses	Meningkatnya cakupan universal akses air minum	Capaian universal akses air minum	Meningkatkan akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	Rerata capaian layanan air minum, sanitasi lingkungan dan penangan kawasan kumuh.	%	88,18	88,18	88,67	89,13	89,53	89,97	90,00	90,00	90,00	PUPR, Perumahan dan pemukiman
								Persentase penduduk memperoleh layanan air minum layak	%	86,20	87	88	89	90	91	92	92	92	DPU-TR (CK)
								Perbandingan antara jumlah rumah tangga yang terlayani dibagi jumlah total penduduk di Kab. Pemalang	%	86,20	87	88	89	90	91	92	92	92	DPU-TR (CK)

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD	
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
a	b	c	d	1 Meningkatkan sanitasi lingkungan layak bagi masyarakat	2 Capaian akses sanitasi lingkungan (drainase, persampahan & air limbah domestik)	3	4	5 Rerata capaian layanan sanitasi lingkungan (drainase, persampahan & air limbah domestik).	6 %	7 60,95	8 61,33	9 63,17	10 65	11 69,99	12 73,67	13 78	14 78	15 DPU-TR (CK)	
						Meningkatkan akses sanitasi layak bagi masyarakat	Perentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik layak dibandingkan dengan total jumlah rumah tangga	%	92,69	91,70	93	94	95	96	97	97	97	DPU-TR (CK)
							Perentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar	Perentase jumlah TPS/TPST/TPS3R sesuai standar yang terbangun dibanding jumlah kebutuhan TPS/TPST/TPS3R di Kabupaten	%	18	20	22,5	25	35	45	55	55	55	DLH
							Perentase jaringan drainase dalam kondisi baik	Perentase drainase dalam kondisi baik dibanding jumlah panjang drainase kabupaten (perkotaan)	%	72,16	72	74	76	78	80	82	82	82	DPU-TR (SDA)

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1 Meningkatnya cakupan universal akses penanganan kawasan kumuh	2 Cakupan luas kawasan kumuh	3 Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan	4 Persentase luasan kawasan kumuh	5 Luasan kawasan kumuh dibawah 10 yang ditangani	6 %	7 1.37	8 1.0	9 0.5	10 0.4	11 0.3	12 0.2	13 0.1	14 0.1	15 Disperkim
								Jumlah RTLH yang diberi bantuan dan peningkatan rumah swadaya	%	21.67	25	29	33	37	41	45	45	Disperkim
		2. Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas					Perhitungan jumlah trayek angkutan jalan (umum) dibagi jumlah trayek angkutan jalan (umum) yang seharusnya tersedia dikali bobot angkutan jalan (umum)	Rasio	Na	75.5	75.5	76	76.25	76.5	76.75	76.75	PUPR, Perhubungan
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas			Perhitungan jumlah trayek angkutan jalan (umum) dibagi jumlah trayek angkutan jalan (umum) yang seharusnya tersedia dikali bobot angkutan jalan (umum)	Rasio	Na	86.6	86.85	87.1	87.35	87.60	87.85	87.85	Dishub
						Meningkatnya	Persentase Pelayanan	Jumlah angkutan umum yang	%	NA	10.81	21.62	32.43	43.24	54.05	64.86	64.86	Dishub

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD	
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						pelayanan angkutan	Angkutan Jalan	memenuhi SPM dibanding dengan jumlah angkutan umum yang tersedia											
						Meningkatkan sarana prasarana perhubungan	Level of Service	V/C Ratio	Rasio	0.44	0.44	0.44	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42	Dishub
						Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Indeks konektivitas	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat pusat produksi(konektivitas di wilayah kabupaten)	%	93,7	93,7	94,28	95,77	97,27	98,74	100	100	100	DPU-TR (Bina Marga)
						Meningkatkan kondisi jalan mantap	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	Total kondisi jalan yang memenuhi kondisi baik dan sedang dibandingkan dengan total panjang jalan kabupaten	%	68,66	63,65	66,64	69,53	72,52	75,41	78,40	78,40	78,40	DPU-TR (Bina Marga)
		3. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya air	Indeks Kinerja Sistem Irigasi					Perhitungan kinerja sistem irigasi: prasarana fisik, produktivitas tanam, sarana penunjang, organisasi personalia.	Indeks	46	48	50	52	53	54	55	55	55	PUPR



Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Unsur/Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air	Indeks Kinerja Sistem Irigasi			dokumentasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Perhitungan kinerja sistem irigasi: prasarana fisik, produktivitas tanam, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	Indeks	46	48	50	52	53	54	55	55	DPU-TR (SDA)
						Meningkatnya pelayanan sistem irigasi	Indeks kinerja sistem irigasi	indeks kinerja sistem irigasi didukung beberapa komponen fisik dan nonfisik meliputi : prasarana fisik (bendung dan kantor jaga bendung, saluran, bangunan bagi, bangunan/alat ukur, saluran pembuang/drainase /sungai pembuang jalan inspeksi) produktifitas tanaman (tonase hasil panen), sarana penunjang (kantor pengelola irigasi dan	%	46	48	50	52	53	54	55	55	DPU-TR (SDA)

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1	2	3	4	5 eplengkapannya, alat komunikasi, kendaraan inspeksi, peralatan kerja), organisasi personalia (jumlah dan kompetensi personil), dokumentasi (ketersediaan peta daerah irigasi, foto-foto kondisi eksisting diwilayah kerja pengelola/LP.JI, tersedia data kebutuhan peralatan, personil dan kekurangannya, tersedia alat rekam yang memadai), kondisi kelembagaan P3A (terbentuknya organisasi P3A, P3A, memiliki program kerja)	%	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4. Meningkatkan pemban gunan yang	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW					Jumlah permohonan perizinan pemanfaatan ruang yang diizinkan		100	100	100	100	100	100	100	100	PUPR, Pertanian

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Ususan/ Unsur/ PD	
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		sesuai tata ruang						dibagi jumlah permohonan perizinan pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW dikali 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DPU-TR (Taru)	
				Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW			Jumlah permohonan perizinan pemanfaatan ruang yang diizinkan dibagi jumlah permohonan perizinan pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW dikali 100%	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DPU-TR (Taru)	
						Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang				100	100	100	100	100	100	100	100	DPU-TR (Taru)	
				Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	Persentase sengketa tanah yang di selesaikan	Berkurangnya sengketa tanah garapan	Persentase sengketa tanah garapan tertangani	(jumlah sengketa tanah garapan yang terselesaikan/jumlah sengketa tanah garapan) x100%	%	10	30	40	60	70	80	100	100	100	Disperkim



Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD	
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						Meningkatkan sertifikasi kepemilikan hak atas tanah	Persentase sertifikasi kepemilikan hak atas tanah terfasilitasi	Jumlah koordinasi PTSL dan sinkronisasi yang dilakukan	%	53,03	60	85	95	100	100	100	100	100	Dispersi
	2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)							Penghitungan komposit dari skor kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan.	Indeks	68,58	68,92	69,07	69,37	69,52	69,67	69,82	69,82	69,82	Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas lingkungan dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	Indeks Kualitas Udara					Ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara	Indeks	85,62	89,37	89,43	89,48	89,53	89,58	89,63	89,63	89,63	DLH
			Indeks Kualitas Air					Ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran air	Indeks	47,33	46,24	46,56	47,28	47,59	47,83	48,24	48,24	48,24	DLH
			Indeks Kualitas Lahan					Ukuran yang menunjukkan luas wilayah vegetasi	Indeks	73,56	70,03	70,08	70,12	70,16	70,20	70,24	70,24	70,24	DLH
				Meningkatkan Konservasi serta pengendalian	Persentase kepuasan masyarakat terhadap penanganan			Ukuran yang digunakan untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap	%	66,62	77,75	79	80	80	81	81	81	81	DLH



Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1 kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.	2 n pencemaran dan kerusakan lingkungan	3	4	5 pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Meningkatnya Indeks kualitas Udara	Skor Indeks Pencemaran Udara	Ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara	Indeks	85,62	89,37	89,43	89,48	89,53	89,58	89,37	89,43	DLH
						Meningkatnya Indeks kualitas air	Skor Indeks Pencemaran air	Ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran air	Indeks	47,33	46,24	46,56	47,28	47,59	47,83	46,56	46,56	DLH
						Meningkatnya Penataan dan Petaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan Dan Kajian Teknis Lingkungan	Jumlah dokumen lingkungan yg dibutuhkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DLH
							Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina dibagi jumlah usaha/kegiatan yang ada pada tahun berjalan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DLH
							Penyelesaian Kasus Lingkungan	Jumlah kasus yang ditindak lanjuti dibagi jumlah seluruh kasus yang	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DLH

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD	
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								ada pada tahun berjalan											
						Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase Masyarakat Yang Aktif Mengelola Lingkungan	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif dalam mengelola lingkungan	%	10	15	20	40	60	80	100	100	100	DLH
						Peningkatan luasan tutupan vegetasi	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Persentase Luas lahan yang ditanami per luas wilayah administrasi	%	43,07	43,074	43,78	43,083	43,087	43,092	43,096	43,096	43,096	DLH
							Persentase Penangan Lahan Kritis	Persentase luas lahan kritis yang ditanami per luas total lahan kritis	%	0,0263	0,0363	0,0463	0,0563	0,0663	0,0763	0,0863	0,0863	0,0863	DLH
				Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Kualitas Pengelolaan sampah di wilayah Kab. Pemalang			Kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi penangan dan pengurangan sampah	%	97,85	97,93	98,8	98,77	98,84	100	100	100	100	DLH

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan/ Unsur/ PD
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
a	b	c	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat.	Persentase Penanganan sampah	kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah	%	74,97	73,99	72,92	71,83	70,95	70,00	70,00	70,00	DLH
							Persentase pengurangan sampah	kegiatan pembatasan timbunan, pendaur ulangan sampah , dan pemanfaatan kembali sampah	%	22,88	23,94	25,88	26,94	27,89	30,00	30,00	30,00	DLH

8.3. Indikator Kinerja Kunci Urusan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat indikator kinerja kunci setiap urusan. Berikut ini indikator kinerja kunci Kabupaten Pemalang:

Tabel 8.3
Indikator Kinerja Kunci Urusan Kabupaten Pemalang

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian						Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Pendidikan
	Urusan Pendidikan												
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5 sampai 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD dibagi jumlah anak usia 5 sampai 6 tahun pada daerah yang bersangkutan x 100%	%	55	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 sampai 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan sekolah dasar dibagi jumlah anak usia 7 sampai 12 tahun pada daerah yang bersangkutan x 100%	%	98	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13 sampai 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan sekolah menengah pertama dibagi jumlah anak usia 13 sampai 15 tahun pada daerah yang bersangkutan x 100%	%	83	100	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7 sampai 18 tahun yang sudah yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dibagi jumlah anak usia 7 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada daerah yang bersangkutan x 100%	%	64,7	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Sekolah berakreditasi minimal B	Nilai akreditasi sekolah (akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian asesmen sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi internal dan eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah)	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Kesehatan											Kesehatan
1.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	Rasio tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk	Per 1000 Penduduk	0.75	0.75	0.76	0.76	0.77	0.77	0.78	0.78	
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	Cakupan rumah sakit terakreditasi minimal strata utama di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	50	40	40	40	40	40	50	50	
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	92.56	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	98.40	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Cakupan bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	99.58	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian						Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	68.44	100	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran	%	23.24	100	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Cakupan orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	36.81	100	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	34.93	100	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	13.35	100	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Cakupan penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	32.73	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Cakupan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	61.67	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Cakupan orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	29.79	100	100	100	100	100	100	100	
14.	Persentase orang resiko HIV terinfeksi mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Cakupan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	30.87	100	100	100	100	100	100	100	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											PUPR
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Perbandingan luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota dibanding Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/kota	%	5	6	7	7	9	9	11	11	
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota dibanding Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten/kota	%	0,1	0,1	0,1	0,1	1	1	1	1	

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota											
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas Irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasi dan pelihara dibanding luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota	%	67	67	68	69	70	71	72	72	
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Layak	%	86,20	87	88	89	90	91	92	92	
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Layak	%	92,69	91,70	93	94	95	96	97	97	
6.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah Pengajuan IMB dalam satu tahun terhadap jumlah keseluruhan bangunan yang ada di Kabupaten Pemalang	%	0,22	0,23	0,25	0,26	0,28	0,30	0,32	0,32	
7.	Tingkat kemantapan Jalan kabupaten/kota	Total Panjang Jalan Kondisi Baik dan Sedang dibandingkan dengan Total Panjang Jalan Kabupaten	%	68,66	63,65	66,64	69,53	75,52	75,41	78,40	78,40	
8.	Rasio operator/ teknisi / tenaga	presentase jumlah tenaga operator/teknisi/tukang yg	%	0,35	0,64	0,94	1,23	1,52	1,82	2,11	2,11	

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	bersertifikat yang terdaftar terhadap jumlah tenaga operator/ teknisi/tukang di kabupaten pemalang										
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persentase kecelakaan kerja pada proyek Pemda	%	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Perumahan dan Kawasan Permukiman											Perkim
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani pada tahun n dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n dikali 100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Luasan kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditangani / luas total kawasan kumuh dibawah 10 ha x 100	Ha	36,88	45	63.5	73.5	83.5	93.5	98	98	
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah RTLH yang diberi bantuan dan peningkatan rumah swadaya	%	78,33	75,00	71,00	67,00	63,00	59,00	55	55	
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,	Jumlah Perumahan memiliki PSU dalam kondisi baik	%	NA	30	33	36	39	42	45	45	

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2 sarana dan Utilitas Umum)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ketertarikan Keterbiban Perlindungan Umum											Trantibumlin mas
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Penyelesaian gangguan tranitibum yang ditemukan	%	75	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Upaya penegakan Perda & Perkada secara tuntas dalam 1 tahun	%	56	60	65	70	75	80	85	85	85
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi seluruh warga negara di kawasan rawan bencana	%	94	94	95	96	97	98	99	99	99
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dibagi seluruh warga negara di kawasan rawan bencana	%	94	95	95	95	95	95	95	95	95
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	%	99,71	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Korban kebakaran yang dapat ditangani	%	65,52	67,5	70	75	80	85	90	90	90



No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian						Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sosial												Sosial
1.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti -----X 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	%	17	17	34	51	68	85	100	100	100	
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran dibagi Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/ kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	85	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Tenaga Kerja												Tenaga Kerja
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan	%	0,89	1,73	2,59	3,52	4,43	5,45	6,61	6,61	6,61	
3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan ----- x 100% Jumlah tenaga kerja	%	31	35,65	38	40,59	43,43	45,78	48,36	48,36	48,36	

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100% Jumlah Perusahaan	%	19,04	20	21,04	21,88	22,79	23,09	23,86	23,86	
5.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	Jumlah pencari (pencari kerja) yang ditempatkan ----- x 100% Jumlah pencari yang terdaftar	%	34,19	44	49	54	59	64	69	69	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											PPPA
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD -----x100% Jumlah seluruh belanja langsung APBD	%	4.84	5.00	5.20	5.40	5.40	5.60	5.60	5.60	5.60
2.	Persentase korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi ----- x 100% Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	%	0.13	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----- X 100.000 Jumlah penduduk perempuan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian						Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2 100.000 penduduk perempuan)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Pangan												
1	Skor PPH	Perhitungan ola pangan masyarakat dibanding pola pangan ideal	nilai	92,6	93,1	93,6	94,1	94,7	95,2	95,2	95,2		Pangan
	Persentase ketersediaan pangan	Jumlah cadangan Pangan dibagi kebutuhan Pangan dikali 100%	%	62,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
	Lingkungan Hidup												LH
1.	Indeks Kualitas Hidup (IKLH) Kab/Kota	Angka yang menunjukkan kualitas kinerja pengelolaan LH di suatu daerah dalam 1 tahun berdasarkan perhitungan IKA, IKU dan IKTL	nilai	68.58	68.92	69.07	69.37	69.52	69.67	69.67	69.67	69.67	
2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persentase penanganan sampah dengan cara pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pendaur ulangan sampah.	%	74.97	75	75	76	76	77	77	77	77	
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase berkurangnya penanggungjawab kegiatan/usaha yang melanggar izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	27	27	28	28	29	29	30	30	30	
	Administrasi Kepemududukan & Catatan Sipil												Adminduk Catpil
1.	Perekaman KTP elektronik	Perbandingan jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun keatas.	%	99,87	99,88	99,89	99,90	99,91	99,92	99,93	99,93	99,93	

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang telah memiliki KIA (satu) hari yang memiliki KIA	Perbandingan anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang telah memiliki KIA terhadap jumlah anak usia 0-17	%	21,01	25	30	35	40	45	50	50	
3.	Kepemilikan akta kelahiran	Perbandingan jumlah anak 0-18 tahun yang telah memiliki akta kelahiran terhadap keseluruhan jumlah anak usia 0-18	%	94,21	92,5	93	93,5	94	94,5	95	95	
4.	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Perbandingan jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan terhadap jumlah keseluruhan OPD di Kabupaten Pemalang	%	10,26	25,64	41,03	56,41	71,79	87,18	100	100	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											Permasdes
1.	Persentase peningkatan status desa mandiri	Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta memiliki kemampuan mengelolanya dan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. (Jumlah Desa Mandiri tahun ini - Jumlah Desa Mandiri pada tahun sebelumnya) / Jumlah Desa Mandiri pada tahun sebelumnya x 100 %	%	50	22,22	54,55	35,29	34,78	25,81	15,38	15,38	
	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana											Daldukk KB



No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	ASFR (15-49) tahun	Banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu (15-49 tahun)	35	35,00	35,00	35,00	34,00	34,00	33,00	33,00	35	
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modernx 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	%	20,59	22,48	22,50	23,00	23,30	23,50	24,00	24,00	
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayanix 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	%	10,12	10,10	10,09	10,08	10,07	10,06	10,05	10,05	
	Perhubungan											Perhubungan
1.	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) / (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) a. Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP b. Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu	%	Na	70	70	70	75	75	80	80	
	V/C ratio	Kinerja lalu lintas kabupaten/ kota Kendaraan/ jam/ panjang jalan	rasio	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	
	Komunikasi dan Informasi											Kominfo

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo _____ x 100% Jumlah perangkat daerah	%	71	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi _____ x 100% Jumlah layanan publik	%	66	70	75	80	85	90	90	90	90
3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah _____ x 100% Jumlah penduduk	%	27	40	45	50	55	60	65	65	65
4.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persentase sumber daya untuk pelayanan yang diinformasikan	%	40	50	50	55	55	55	60	60	60
5.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persentase informasi keuangan yang dapat diakses publik	%	30	40	40	40	40	40	40	40	40
	Koperasi dan UKM											Koperasi UKM
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT volume usaha dan asset dibagi Jumlah seluruh koperasi kali 100 %	%	26.97	31	33	36	39	41	43	43	43

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian						Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirasausaha dibagi Jumlah usaha mikro keseluruhan kali 100 %	%	34,16	33,66	34,66	35,66	36,66	37,66	38,66	38,66		
	Penanaman Modal												Penanaman Modal
1.	Persentase peningkatan PMA & PMDN	(Nilai investasi tahun n - tahun (n-1) dibagi nilai investasi tahun n-1)x 100%	%	-90,5	1	2	3	4	5	6	6		
	Pemuda dan Olahraga												Pemuda & olahraga
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah Pemuda (16 – 30 tahun) yang berwirasaha Jumlah pemuda (16 – 30 tahun) di kabupaten	%	0,00	0,02	0,04	0,07	0,08	0,09	0,11	0,11		
2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah Pemuda (16 – 30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat di kabupaten/kota = Jumlah pemuda (16 – 30 tahun) di kabupaten/ko	%	28,08	29,04	30,01	30,98	31,95	32,92	33,88	33,88		
3.	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga regional, nasional dan internasional	medali	0	7	10	15	20	25	30	30		
	Statistik												Statistik
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Jumlah OPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100		

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2 perencanaan pembangunan daerah	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah $\frac{\text{Jumlah OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persandian											Persandian
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai perarea keamanan informasi $\frac{\text{Jumlah area penilaian}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$	%	20	20	20	40	100	100	100	100	100
	Kebudayaan											Kebudayaan
1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	90,52	100	100	100	100	100	100	100	
	Perpustakaan											Perpustakaan
1.	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Dilakukan dengan metode survei dengan pengukuran dimensi utama adalah : Frekuensi membaca, Durasi membaca dan Jumlah buku yang dibaca.	%	55,25	55,33	55,35	55,45	55,50	55,53	55,55	55,55	

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan	
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.	Indeks Pmbangunan Literasi Masyarakat	<p>Pengukuran terhadap usaha pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.</p> <p>Formulasi Indikatornya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan Layanan; 2. Ketercukupan Koleksi; 3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan; 4. Tingkat Kunjungan Masyarakat; 5. Jumlah Perpustakaan Ber-SNP 6. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan; 7. Anggota Perpustakaan; 	Indeks	7,033	7,150	7,300	7,600	7,900	8,200	8,500	8,500		
	Kearsipan												
1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	<p>Ketersediaan arsip di LKD (Lembaga Kearsipan Daerah) sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban</p> <p>Formulasi Indikatornya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase arsip aktif yang telah dibuat daftar arsip 2. Persentase arsip inaktif yang telah dibuat daftar arsip 3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 	%	7,12	10,00	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70	Kearsipan

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Keberadaan dan keutuhan arsip di LKD (Lembaga Kearsipan Daerah) sebagai pertanggungjawaban Formulasi Indikatornya : 1. Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan arsip dengan NSPK 2. Tingkat Kesesuaian Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan dari Bencana dengan NSPK 3. Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah kabupaten/kota dengan NSPK 4. Tingkat Kesesuaian Kegiatan Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK 5. Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pencarian Arsip Statis dengan NSPK 6. Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dengan NSPK	%	5,45	6,45	6,45	7,10	7,48	7,74	8,37	8,37	
	Kelautan dan Perikanan											Perikanan
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Jumlah total produksi perikanan tangkap dan budidaya	1000 ton	35,89	36	37	38	39	40	41	41	

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian						Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.	Angka Konsumsi Ikan	Rerata konsumsi ikan per kapita per tahun	Kg/kap/thn	34,46	34,5	34,5	34,5	35	35,5	36	36		
	Pariwisata											Pariwisata	
1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$= \frac{\text{Jumlah wisatawan mancanegara}}{\text{Jumlah target wisatawan mancanegara}} \times 100\%$	%	0	0	100	50	33,33	50	50	50		
2.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	$= \frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n - 1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - 1} \times 100\%$	%	-28,84	10	10	10	10	10	10	10	10	
3.	Tingkat hunian akomodasi	$= \frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	%	24,17	25,38	26,65	29,32	32,25	35,47	39,02	39,02		
	Pertanian											Pertanian	
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produksi pertanian (padi) dibagi luas panen	Kw/ha	63,20	63,21	63,22	63,23	63,24	63,25	63,26	63,26		
2.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Upaya pengendalian penyakit hewan yang menular	%	10,30	10,31	10,32	10,33	10,34	10,35	10,36	10,36		
3.	Produksi peternakan utama (daging sapi, daging ayam dan telur ayam)	Jumlah akumulasi produksi daging sapi potong + daging ayam pedaging + daging ayam petelur + daging ayam buras + produksi telur ayam petelur + produksi telur ayam buras	ton	8.531	8.540	8.550	8.560	8.570	8.580	8.590	8.590		

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Perdagangan											Perdagangan
1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki ijin sesuai ketentuan dibagi jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota kali 100%	%	8.04	8.2	8.4	8.5	8.7	8.8	9	9	
2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi dibagi RDKK kali 100%	%	95	95	96	97	98	99	99	99	
3.	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan dibagi jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota kali 100%	%	3.16	7	10	15	20	25	25	25	
	Perindustrian											Perindustrian
1.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun (n) - Jumlah industri kecil dan menengah tahun (n-1) dibagi - Jumlah industri kecil dan menengah tahun (n-1) kali 100%	%	0.25	2	5	6	6	6	6	6	
2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi Jumlah izin yang dikeluarkan dikali 100%	%	0	30	30	30	60	60	60	60	
3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi jumlah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2 jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	3 pemohonan/ pengajuan ijin yang masuk kali 100%	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Transmigrasi											
	Persentase Transmigran yang ditempatkan	Jumlah transmigran yang ditempatkan dibandingkan dengan jumlah yang mendaftar	%	20	20	20	30	30	40	40	40	Trnasmigrasi
	Sekretariat Daerah											Setda
1.	Persentase pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif)/(Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif)x100%	%	9.90	9.90	10,3	10,4	10,6	10,6	10,9	10,9	
2.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Mengukur rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan)/(Total belanja langsung) x 100%	%	56.34	56.34	56,90	57	57,10	57,30	57,5	57,5	
	Keuangan											Keuangan
1.	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan dibagi Jumlah APBD x 100%	%	13,12	13,14	13,14	13,16	13,16	13,18	13,20	13,20	
2.	Rasio PAD	Realisasi PAD dibagi pendapatan daerah dikali 100%	%	12,72	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	
3.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Belanja Urusan Pemerintahan (Seluruh Belanja Daerah diluar	%	60	60	60	60	60	60	60	60	

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal					Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
1	2 (dikurangi transfer expenditures)	3 Belanja Modal) dikurangi transfer expenditure (Hibah, Bansos, Belanja Subsidi, Belanja Bunga, Belanja Banku dan BTT) dibagi Jumlah Belanja APBD dikalikan 100%	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal	%	-4,92	-4,91	-4,90	-4,89	-4,88	-4,87	-4,86	-4,86				
5.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal	%	0	5	5	5	5	5	5	5				
6.	Manajemen Aset	Manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada	%	100	100	100	100	100	100	100	100				
7.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	4,27	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25				
	Kepegawaian													Kepegawaian	
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas Jumlah Pegawai dengan Pendidikan SMA ke bawah x 100%	%	110,81	110,81	115	120	125	130	135	135				
2.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai PNS Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan) x 100%	%	5,27	5,27	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	10,00				



No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (diluar guru & tenaga kesehatan) $\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$ Seluruh Jumlah Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru & tenaga kesehatan)	%	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	6,00	
	Pengawasan											Pengawasan
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat kematangan/keempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Skor	3,0375	3,0380	3,0385	3,0390	3,0395	3,0400	3,0405	3,0405	
2.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	

BAB IX

PENUTUP

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Prioritas dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang berpedoman pada arah dan kebijakan nasional dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan memperhatikan arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 serta mengacu RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2025. Dokumen RPJMD ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan serta penetapan Indikator Kinerja Daerah.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta berfungsi sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama periode Tahun 2021 – 2026.

Pencapaian target indikator kinerja daerah merupakan serangkaian pencapaian indikator program-program prioritas yang termuat dalam RPJMD ini dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan kapasitas daerah yang tersedia baik dari pemerintah daerah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat secara sinergis untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah.

9.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah ketika RPJMD Kabupaten Pemalang periode berikutnya belum disusun. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan daerah maka pedoman transisi ditetapkan bahwa:

- a. Penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD ini dengan mengacu pada arah kebijakan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, arah kebijakan dan sasaran pokok dari RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045.

Dokumen RKPD Tahun 2026 tersebut juga harus menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari arah kebijakan dan indikasi program prioritas dari RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2026-2031. Selanjutnya RKPD dimaksud dipergunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD Kabupaten Pemalang tahun Anggaran 2026.

- b. Penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2027 mengacu pada arah kebijakan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, arah kebijakan dan sasaran pokok dari RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045, serta mempertimbangkan trend pencapaian indikator kinerja RPJMD ini.

Dokumen RKPD Tahun 2027 tersebut juga harus menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari arah kebijakan dan indikasi program prioritas dari RPJMD Kabupaten Pemalang periode berikutnya.

- c. Jika telah diterbitkan peraturan perundang-undangan minimal setingkat Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur secara khusus mengenai penyusunan RKPD Tahun 2027 maka peraturan tersebut menjadi pedoman sepenuhnya.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan kaidah pelaksanaan bermakna sebagai pedoman dalam pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas pendanaan dan waktu pelaksanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pembangunan daerah merupakan perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026, dikemukakan sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pemalang wajib melaksanakan arah kebijakan dan program dalam RPJMD sebaik-baiknya;
2. Semua perangkat daerah Kabupaten Pemalang berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menguraikan tentang strategi, arah kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 untuk setiap tahun disusun dalam RKPD yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Pemalang;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, maka Bappeda Kabupaten Pemalang wajib menyelenggarakan pengendalian terhadap capaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah secara berkala;
5. RPJMD Kabupaten Pemalang 2021 – 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang setiap tahun dan selanjutnya RKPD merupakan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS);

Selanjutnya agar dapat menjamin pencapaian visi, misi dan program/ kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang.

BUPATI PEMALANG,

Cap
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006